KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

4N9PBVIO

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 4 3 0 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS	S PENERIMA PENGHASIL	AN YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP : 1 4 4 5 4 5 5 5 5 7 2 6 0 0 0							
A.2 NIK	:						
A.3 Nama	: JAYA MUALIM	N	<u> </u>				
B. PPh PASA	L 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJA (mm-yyyy)	INODE ODGEN I AGAIN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01	139.358.100	139.358.100	0	15	20.903.715	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0						TIMLID	
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi : C.4 Tanggal .		2 6 dd 0 1 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :			HARI JUMADI				
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					benar dan telah saya		
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	c mengatur bahwa c	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	